

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Dapatkah pemberdayaan masyarakat hutan yang dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat menjadi suatu strategi yang memberikan solusi terhadap pembangunan kehutanan yang berkelanjutan di Indonesia? Hal tersebut merupakan pertanyaan penting dalam studi pemberdayaan masyarakat dan studi pengelolaan hutan. Pertanyaan tersebut mencoba mencari tahu dan menganalisis sejauh apa partisipasi dari LSM sebagai pihak ketiga diluar pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat hutan. Selama ini, pemberdayaan masyarakat hutan yang dilakukan oleh pemerintah menemui berbagai kendala seperti kebijakan nasional dan kebijakan daerah yang tidak bersinergi sehingga prosesnya memakan waktu serta kemampuan pelaku pemberdaya dari pemerintah yang kualitasnya belum teruji dalam melakukan pemberdayaan masyarakat hutan (Mawardi dan Sudaryono, 2006; Suji, 2010).

Pertanyaan sebelumnya menjadi dasar dalam kemunculan penelitian ini. Penelitian dengan judul “Pemberdayaan dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan: Studi Kasus Strategi Pemberdayaan Masyarakat Hutan Sokokembang LSM swaraOwa di Kabupaten Pekalongan” berusaha mengkaji strategi pemberdayaan masyarakat hutan oleh LSM swaraOwa dengan memakai perspektif pembangunan berkelanjutan sebagai kacamata yang utama dalam melihat pemberdayaan yang dilakukan. Apakah LSM dalam melakukan pemberdayaan masyarakat hutan memunculkan sebuah inovasi baru? Atau justru

tidak lebih baik dari pemerintah? Untuk itu, pertanyaan yang diajukan oleh peneliti kali ini merupakan pertanyaan yang meliputi strategi pemberdayaan masyarakat hutan LSM swaraOwa dalam perspektif pembangunan berkelanjutan dan dampak yang dihasilkan dari strategi pemberdayaan masyarakat hutan yang diterapkan di Hutan Sokokembang, Kabupaten Pekalongan. Kedua pertanyaan tersebut tentunya memiliki kata kunci penting, yaitu pemberdayaan masyarakat hutan dan perspektif pembangunan berkelanjutan, dimana hasil yang didapat akan menjawab pertanyaan-pertanyaan penting seputar pemberdayaan masyarakat hutan.

Pemberdayaan masyarakat tercipta atas realita bahwa pemerintah tidak sanggup mengatasi masalah kemiskinan seorang diri. Pemberdayaan masyarakat sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah kemiskinan merupakan suatu pendekatan *bottom up* karena dalam prakteknya masyarakat didudukkan sebagai aktor utama yang harus memiliki keswadayaan serta kemandirian. Bahkan Bank Dunia menetapkan pemberdayaan sebagai salah satu pilar dari Strategi Trisula (*three-pronged strategy*) untuk mengentaskan kemiskinan (Mardikanto dan Soebianto, 2015: 26). Tidak terkecuali pada masyarakat hutan yang memiliki sumberdaya hutan yang melimpah. Masyarakat hutan dengan nilai-nilai lokalnya memiliki potensi besar untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang berkelanjutan jika diberdayakan dengan baik.

Selama ini masyarakat hutan memiliki kondisi serta posisi tawar yang lemah dalam pembangunan kehutanan di Indonesia sehingga secara langsung menimbulkan konflik antara masyarakat lokal dengan pemerintah. Seperti konflik

pengelolaan hutan di Kawasan Hutan Lindung Register 45B Bukit Rigis, Kabupaten Lampung Barat yang terjadi karena masyarakat sekitar hutan menggarap lahan dan bertempat tinggal di kawasan hutan lindung (Pasya, 2017). Secara historis tentunya masyarakat lokal sudah turun temurun tinggal dan menggarap lahan di kawasan tersebut, namun regulasi pemerintah tentang pengelolaan hutan lindung di Indonesia menjadi mata pisau bagi masyarakat lokal karena keberadaan masyarakat lokal yang belum diakui dalam regulasi dan dinilai merusak fungsi hutan lindung. Contoh kasus tersebut menyiratkan bahwa masyarakat lokal benar-benar memiliki kondisi dan posisi tawar yang lemah dalam pembangunan kehutanan di Indonesia. Pada kasus seperti ini, pemberdayaan masyarakat diperlukan untuk menciptakan kemandirian dan keswadayaan masyarakat (Wrihatnolo dan Dwidjowijoto, 2007: 76) serta pada tahap yang lebih tinggi yaitu memperbaiki kondisi dan memperkuat posisi tawar masyarakat dalam pengelolaan hutan dan sumberdayanya.

Memberdayakan masyarakat berarti memunculkan partisipasi aktif daripada masyarakat pada tahap perumusan, pelaksanaan, penikmatan hasil, dan evaluasi (Wrihatnolo dan Dwidjowijoto, 2007), tidak terkecuali pada pemberdayaan masyarakat hutan. Akan tetapi, poin penting yang harus ada dalam pemberdayaan masyarakat hutan yaitu terkelolanya sumberdaya hutan yang berkelanjutan oleh masyarakat hutan itu sendiri. Dengan kata lain, ada aspek pembangunan kehutanan yang berkelanjutan dalam pemberdayaan masyarakat hutan.

Sumberdaya hutan yang sifatnya terbatas dan susah untuk diperbaharui menjadi permasalahan tersendiri dalam kasus pengelolaan hutan. Tercatat pada tahun 2011 laju deforestasi hutan di Indonesia 1,01 juta 4ectare pertahun dengan dampak kerusakan lingkungan yang memperihatinkan dan salah satu faktor utama yang mempengaruhi deforestasi hutan yaitu alih fungsi lahan hutan oleh masyarakat dan ketidaktahuan masyarakat dalam memanfaatkan sumberdaya hutan dengan baik (Pasya, 2017: 12). Data tersebut menjadi indikasi bahwa diperlukannya pemberdayaan masyarakat hutan yang mendukung kelestarian hutan dan sumberdayanya. Strategi yang diimplementasikan dalam pemberdayaan masyarakat hutan membutuhkan nilai-nilai pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), sehingga dapat menjadi jembatan bagi masyarakat hutan agar dapat mengelola sumberdaya hutan dengan tetap menjaga kelestarian hutan untuk generasi selanjutnya. Nilai-nilai pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) dalam pemberdayaan masyarakat hutan berusaha menjaga dan mempersiapkan sumberdaya yang memadai pada masa yang akan datang sehingga generasi selanjutnya tetap bisa mengelola dan memanfaatkan sumberdaya hutan.

Pemberdayaan masyarakat hutan dengan menerapkan nilai-nilai pembangunan berkelanjutan perlu ditopang oleh adanya keberlanjutan ekologis, ekonomis, dan sosial (Abdoellah, 2017: 198). Ketiga aspek tersebut harus saling terkait dan berjalan secara selaras agar keberhasilan dalam pemberdayaan masyarakat hutan tidak hanya menjadi sebuah hal yang utopis.

LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) swaraOwa hadir sebagai sebuah LSM yang bergerak di bidang lingkungan dengan mengarusutamakan konservasi satwa sebagai *main project* mereka. Salah satu gerakan LSM swaraOwa dalam melakukan konservasi satwa di Indonesia yaitu dengan melibatkan masyarakat hutan sebagai mitra utama dalam gerakannya. Masyarakat Hutan Sokokembanglah yang sampai saat ini menjadi salah satu mitra utama LSM swaraOwa dalam menggalakkan konservasi satwa. LSM swaraOwa berusaha melakukan pencerdasan kepada masyarakat Hutan Sokokembang terkait pengelolaan sumberdaya hutan yang berkelanjutan sehingga dalam memanfaatkan hutan masyarakat tidak akan merusak ekosistem yang ada di Hutan Sokokembang. Masyarakat lokal mempunyai hubungan langsung dengan Hutan Sokokembang karena dari hutan lah mereka memenuhi kebutuhan ekonominya. Kopi dan madu menjadi komoditas yang masyarakat manfaatkan secara langsung dari Hutan Sokokembang. Keberadaan Hutan Sokokembang tentunya sangat penting, karena salah satu manfaat hutan yaitu untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat (Pasya, 2017: 13).

Pembangunan kehutanan yang berkelanjutan harus didukung oleh penerapan nilai lokal yang dimiliki masyarakat serta adaptasi pengelolaan sumberdaya alam yang sesuai dengan perkembangan zaman (Kurniawan, 2012: 12). Sangat jelas bahwa keberhasilan pembangunan kehutanan yang berkelanjutan membutuhkan partisipasi aktif masyarakat hutan. Partisipasi aktif dapat terbentuk ketika masyarakat hutan diberdayakan dengan baik. LSM sebagai pihak yang sangat dekat dengan masyarakat (*grassroot*) mempunyai tugas untuk mengasah

kemampuan dan potensi masyarakat melalui berbagai pendekatan sehingga masyarakat mampu melepaskan diri dari garis kemiskinan (Soetomo, 2012). Kali ini, LSM swaraOwa menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat untuk mengasah kemampuan dan potensi masyarakat Hutan Sokokembang.

Dalam hal ini, LSM swaraOwa hadir sebagai pihak yang memberdayakan masyarakat di Hutan Sokokembang dengan tujuan yang ingin mereka capai yaitu membangun kesadaran kritis serta partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan pembangunan kehutanan yang berkelanjutan. Sehingga masyarakat Hutan Sokokembang diharapkan mampu memanfaatkan hutan untuk peningkatan taraf ekonomi dan menjaga kelestarian hutan untuk generasi selanjutnya yang akan menempati sekitar kawasan Hutan Sokokembang.

Berdasarkan latar permasalahan dan urgensi mengenai pemberdayaan masyarakat hutan serta implikasinya terhadap pembangunan kehutanan yang berkelanjutan yang telah dijelaskan diatas, penelitian ini berusaha mengkaji lebih dalam mengenai strategi pemberdayaan masyarakat hutan LSM swaraOwa dalam perspektif pembangunan berkelanjutan di Hutan Sokokembang, Kabupaten Pekalongan.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah merupakan rangkaian sebuah pertanyaan tentang konsep atau fenomena apa yang akan diteliti. Berdasarkan keterangan yang telah dipaparkan tersebut, rumusan masalah yang akan menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana strategi yang dilakukan oleh LSM swaraOwa dalam pemberdayaan masyarakat hutan dalam perspektif Pembangunan Berkelanjutan?
2. Bagaimana dampak yang dihasilkan dari strategi pemberdayaan masyarakat hutan yang dilakukan oleh LSM swaraOwa?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian berarti menunjukkan “mengapa anda ingin melakukan penelitian dan apa yang ingin anda capai”. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, tujuan penelitian yang akan dicapai oleh peneliti yaitu:

1. Menjelaskan dan menganalisis strategi yang digunakan oleh LSM swaraOwa dalam pemberdayaan masyarakat hutan dalam perspektif pembangunan berkelanjutan di Hutan Sokokembang.
2. Menjelaskan dan menganalisis dampak yang dihasilkan dari strategi pemberdayaan masyarakat hutan yang dilakukan oleh LSM swaraOwa di Hutan Sokokembang.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian dibedakan menjadi dua yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Adapun manfaat yang ingin dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu:

#### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini memberikan manfaat yaitu menambah wawasan pengetahuan di masa yang akan datang, khususnya

tentang peran Lembaga Swadaya Masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat serta memberikan suatu konsep pemikiran yang menjadi bahan-bahan bagi penelitian yang akan datang dalam bidang pengelolaan hutan pelestarian. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pengetahuan dan perkembangan ilmu pemerintahan dalam aspek keterlibatan pihak ketiga sebagai aktor penting implemementasi pemberdayaan masyarakat.

#### **1.4.2. Manfaat Praktif**

##### a) Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam melakukan kerjasama dengan masyarakat, swasta, maupun LSM terkait pemberdayaan masyarakat, sehingga keluaran yang dicapai dalam pemberdayaan masyarakat tersebut mampu memberikan efek positif dalam pengelolaan dan perlindungan kawasan hutan di Indonesia.

##### b) Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan pengetahuan serta pengalaman peneliti. Dengan terjun langsung dalam proses memperoleh data, peneliti akan memiliki pengalaman yang nantinya berguna dan dapat diaplikasikan dalam dunia kerja. Melalui tahap-tahap yang harus dijalani dalam penelitian, peneliti belajar bagaimana cara untuk memperoleh data dengan cara yang baik dan bagaimana data tersebut dapat dipertanggungjawabkan kedepannya.



### c) Bagi Masyarakat

Dengan adanya penelitian ini, peneliti mengharapkan bahwa nantinya masyarakat memiliki wawasan dan pengetahuan tentang pentingnya pemberdayaan masyarakat. Masyarakat dapat memahami arti penting dari keberadaan kemandirian serta keswadayaan masyarakat. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kesadaran kepada masyarakat terkait pemberdayaan masyarakat yang berwawasan kepada pembangunan berkelanjutan sehingga masyarakat benar-benar memahami pentingnya pengelolaan sumberdaya yang berkelanjutan.

## 1.5. Tinjauan Pustaka

Peneliti telah melakukan tinjauan terhadap penelitian-penelitian sebelumnya mengenai pemberdayaan masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat. Disimpulkan bahwa terdapat dua isu utama yang selalu dibahas dalam penelitian pemberdayaan masyarakat yaitu isu **strategi pemberdayaan** dan **hasil dari pemberdayaan**.

**Pertama**, kajian tentang strategi pemberdayaan masyarakat yang terkonfirmasi dalam penelitian yang dilakukan oleh Mawardi dan Sudaryono (2006), Aryadi, Fauzi, dan Naemah (2010), Garjita, Susilowati, dan Soeprbowati (2014), Suji (2010), Resi (2009), Saraswati (Tanpa Tahun) serta Effendi, Bangsawan, dan Zahrul (2007). Melalui penelitian-penelitian tersebut diketahui adanya tiga fokus kajian tentang strategi pemberdayaan masyarakat yaitu fokus mengenai proses-proses dan tahapan yang harus dihadapi sebelum pemberdayaan masyarakat diimplementasikan meliputi penguatan pondasi pemberdayaan

masyarakat dan penyusunan strategi pemberdayaan masyarakat, fokus mengenai kemitraan atau pembangunan jejaring antar lembaga dalam pemberdayaan masyarakat seperti Perhutani, Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan terakhir fokus mengenai model dan pola pemberdayaan masyarakat yang digunakan.

**Kedua**, kajian tentang hasil dari pemberdayaan masyarakat yang terkonfirmasi dalam penelitian yang dilakukan oleh Iskandar, Almutahar, dan Sabran (2013), Riva (2009), Khoirunnisa (2017), Sitorus (Tanpa Tahun) dan Praja (2009). Penelitian-penelitian sebelumnya memfokuskan hasil dari pemberdayaan masyarakat melalui refleksi serta evaluasi peran Lembaga Swadaya Masyarakat sebagai organisasi sosial yang mengadvokasikan kepentingan masyarakat.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian yang mengkaji tentang strategi pemberdayaan masyarakat. Fokus kajian dalam penelitian ini mengenai strategi pemberdayaan masyarakat hutan LSM swaraOwa di Hutan Sokokembang, Kabupaten Pekalongan. Namun, penelitian ini tidak akan mengkaji strategi pemberdayaan masyarakat seperti penelitian-penelitian sebelumnya yang kajiannya merupakan kajian yang sifatnya umum. *Missing Link* dalam penelitian-penelitian sebelumnya yaitu tidak adanya perspektif atau kacamata dalam mengkaji pemberdayaan masyarakat sehingga kajiannya tidak memiliki fokus khusus. Penelitian ini akan mengisi bagian kekosongan tersebut, dimana penelitian ini akan menggunakan sebuah perspektif dalam mengkaji strategi pemberdayaan masyarakat yaitu **perspektif Pembangunan Berkelanjutan**.

Kajian tentang strategi pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan perspektif pembangunan berkelanjutan nantinya akan memiliki fokus pemberdayaan masyarakat yang berkorelasi terhadap nilai-nilai pembangunan berkelanjutan. Se jauh mana pemberdayaan masyarakat berperan penting dalam agenda pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

## **1.6. Landasan Teori**

Perspektif teoritis dalam penelitian ini akan menggambarkan secara fokus apa saja teori-teori yang berkaitan dengan judul penelitian. Teori-teori tersebut dihubungkan secara detail dan integratif dalam cakupan masalah-masalah yang akan diteliti. Teori yang digunakan akan berguna untuk memberikan landasan-landasan dalam menganalisis temuan-temuan penelitian sehingga hasil dalam pembahasan akan lebih memiliki dasar pemikiran dari sebuah teori yang digunakan.

### **1.6.1. Pemberdayaan Masyarakat oleh Lembaga Swadaya**

#### **Masyarakat**

Secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata dasar “daya” yang berarti kekuatan atau kemampuan (Sulistiyani, 2004: 77). Berangkat dari pengertian tersebut, pemberdayaan berarti suatu proses menuju berdaya atau dapat dikatakan sebagai proses untuk mencapai suatu kekuatan atau kemampuan serta proses pemberian kekuatan atau daya dari pihak yang memiliki kekuatan kepada pihak yang lemah atau tidak mempunyai kekuatan. Rappaport dalam Suharto (2009) memberikan sebuah definisi mengenai pemberdayaan yaitu “suatu cara

dengan mana rakyat, organisasi, dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai (atau berkuasa atas) kehidupannya”.

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu konsep yang mencakup pengertian pembangunan masyarakat (*community development*) dan pembangunan yang bertumpu kepada masyarakat (*community-based development*). Pemberdayaan masyarakat dimaknai sebagai upaya yang sengaja untuk memfasilitasi masyarakat lokal dalam perencanaan, keputusan dan pengelolaan sumberdaya lokal yang dimiliki melalui *collective action* dan jejaring sehingga pada akhirnya masyarakat memiliki kemampuan dan kemandirian secara ekonomi, ekologi dan sosial (Mardikanto dan Soebianto, 2015: 45). Berkaitan dengan pemaknaan konsep tentang pemberdayaan masyarakat bahwa sebenarnya terdapat tiga nilai inti dari pemberdayaan yaitu pengembangan (*enabling*), memperkuat posisi atau daya (*empowering*) dan terciptanya kemandirian.

Pemberdayaan masyarakat diamanatkan untuk mengemban tujuan guna pembentukan individu dan masyarakat yang memiliki kemandirian. Kemandirian tersebut mencakup kemandirian dalam memikirkan, menentukan serta melaksanakan sesuatu yang dianggap sebagai solusi pemecahan masalah dengan mempergunakan daya kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik, afektif dan didukung oleh pengerahan sumberdaya yang dimiliki oleh masyarakat. Secara spesifik dapat dijelaskan bahwa tujuan pemberdayaan masyarakat yaitu mendorong masyarakat untuk

memiliki kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik dan afektif (Sulistiyani, 2004:80).

Kondisi kognitif pada hakikatnya menjadi sebuah kemampuan berpikir yang dilandasi atas pengetahuan dan wawasan seseorang atau masyarakat dalam menemukan solusi dari sebuah permasalahan. Kondisi konatif merupakan pembentukan sikap dan perilaku masyarakat agar masyarakat memiliki sensitifitas terhadap nilai-nilai pembangunan dan pemberdayaan. Sedangkan kemampuan psikomotorik adalah kemampuan masyarakat dalam hal kecakapan dan keterampilan untuk mendukung masyarakat dalam aktivitas pembangunan. Kondisi afektif sebagai suatu kondisi dimana masyarakat sudah memiliki keberdayaan serta kemandirian dalam sikap dan perilaku. Apabila keempat aspek tersebut sudah dimiliki oleh masyarakat, bukan tidak mungkin bahwa pemberdayaan telah tercapai dengan baik.

#### **1.8.7.1. LSM sebagai Pelaku Pemberdayaan Masyarakat**

Lembaga Swadaya Masyarakat merupakan sebuah organisasi kemasyarakatan yang posisinya berada di luar pemerintah yang mempunyai tujuan guna memperkuat atau memperbaiki kondisi masyarakat. Tentu saja orientasi dari LSM bukan merupakan orientasi yang bergerak ke arah materi, melainkan dalam hal non materi seperti pengembangan dan peningkatan kemampuan masyarakat.

Sebelum mengenal lebih jauh mengenai sejauh apa keterlibatan LSM dalam pemberdayaan masyarakat, lebih dahulu harus

mengetahui apa yang dimaksud dengan Lembaga Swadaya Masyarakat. Menurut Instruksi Mendagri Nomor 8 Tahun 1990 tentang Pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat, LSM dapat diartikan sebagai:

*“Organisasi atau lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas kehendak sendiri dan berminat serta bergerak di bidang kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh organisasi atau lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, yang menitikberatkan kepada pengabdian secara swadaya.”*

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat diketahui perbedaan antara LSM dengan organisasi-organisasi lain. Priyono dan Pranarka (1996) memperjelas perbedaan yang lebih rinci melalui ciri-ciri yang dimiliki oleh Lembaga Swadaya Masyarakat, adapun ciri-cirinya yaitu:

1. LSM tidak termasuk ke dalam organisasi pemerintah, birokrasi maupun lembaga negara lainnya.
2. LSM dalam melakukan kegiatannya tidak bertujuan untuk memperoleh keuntungan (nirlaba).
3. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan berdasarkan kepentingan masyarakat umum, tidak hanya untuk kepentingan anggotanya saja seperti yang dilakukan oleh koperasi ataupun organisasi profesi.

Secara umum LSM dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis yaitu Organisasi Donor, Organisasi Mitra Pemerintah, Organisasi Profesional dan Organisasi Oposisi. Jika dikaitkan dengan konteks pemberdayaan masyarakat, terdapat dua jenis LSM yang relevan, yaitu:

Pertama, LSM sebagai Organisasi Mitra Pemerintah, karena LSM melakukan kegiatan dengan bermitra dengan pemerintah dalam menjalankan kegiatannya.

Kedua, LSM sebagai Organisasi Profesional, karena LSM bergerak dalam kegiatan-kegiatan yang berdasarkan kemampuan profesional tertentu seperti organisasi non pemerintah pendidikan, organisasi non pemerintah bantuan hukum, organisasi non pemerintah jurnalisme dan organisasi non pemerintah pembangunan ekonomi.

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) memposisikan diri sebagai pekerja sosial dalam suatu pemberdayaan masyarakat. LSM sebagai pekerja sosial menjalankan tindakan pendampingan sosial karena merupakan agen yang terlibat dalam proses pemecahan masalah masyarakat (Suharto, 2009).

#### **1.6.1.2. Strategi Pemberdayaan Masyarakat LSM**

Dalam menjalankan tugas sebagai pekerja sosial, LSM memiliki empat bidang tugas atau fungsi pendampingan sosial dalam pemberdayaan masyarakat, empat bidang tersebut terdapat dalam akronim 4P, yaitu:

##### **1. Pemungkinan atau Fasilitasi (*Enabling*)**

Tugas dan fungsi ini dijalankan oleh LSM dalam rangka membangun motivasi dan memberikan kesempatan bagi masyarakat (Suharto, 2009: 95). Fungsi ini sangat penting karena dalam pemberdayaan masyarakat, masyarakat menjadi

subjek yang harus memiliki motivasi yang tinggi dan kesempatan yang sama untuk berkembang. Contoh : mediasi dan negosiasi, membangun konsensus bersama dan manajemen sumberdaya.

**2. Penguatan (*Empowering*)**

Fungsi ini merupakan fungsi yang menjalankan pendidikan dan pelatihan untuk memperkuat kapasitas masyarakat di lingkungannya (*capacity building*). Kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk membangkitkan kesadaran masyarakat, menyampikan informasi, melakukan konfrontasi serta menyelenggarakan pelatihan adalah tugas atau fungsi penguatan.

**3. Perlindungan (*Protecting*)**

Fungsi perlindungan merupakan fungsi yang dijalankan pekerja sosial dalam kaitannya dengan interaksi kelembagaan yang dibangun untuk memberikan sarana pembelaan melalui media-media untuk meningkatkan hubungan dan jaringan kerja masyarakat. Selain itu, LSM berperan sebagai konsultan dalam fungsi ini yang terkait dengan pemecahan masalah masyarakat.

**4. Pendukungan (*Supporting*)**

Fungsi ini mewajibkan LSM sebagai pekerja sosial untuk turut serta dalam segala sesuatu yang bersifat aplikatif, LSM harus ikut melaksanakan tugas-tugas teknis yang telah dirumuskan



bersama dengan menggunakan kemampuan-kemampuan yang dimiliki sebagai pekerja sosial seperti analisis sosial, manajemen konflik, membangun relasi, negosiasi, komunikasi dan mengatur sumber dana.

Sulistiyani (2004) memaparkan tahap-tahap dalam pemberdayaan masyarakat. Tahap-tahap memberikan paparan mengenai pengaruh dari adanya pemberdayaan masyarakat terhadap kondisi masyarakat yang diberdayakan. Penelitian ini akan menggunakan tahap-tahap tersebut sebagai nilai ukur atau kualitas yang dihasilkan dari pemberdayaan masyarakat karena substansi dari tahap-tahap tersebut merupakan substansi perubahan kondisi masyarakat yang dianggap cocok untuk menjadi nilai ukur atau kualitas dari pemberdayaan masyarakat. Adapun kualitas-kualitas pemberdayaan masyarakat meliputi:

**Penyadaran dan Pembentukan Perilaku**, pemberdayaan masyarakat berfungsi untuk membentuk perilaku sadar dan peduli hingga akan menumbuhkan peningkatan kapasitas diri. Kondisi ini merupakan kondisi yang umumnya terjadi setelah dilakukannya pemberdayaan masyarakat. Pihak pemberdaya atau aktor yang berperan dalam pemberdayaan akan menciptakan suatu kondisi yang dapat memfasilitasi proses pemberdayaan agar berjalan efektif. Apa yang diintervensi dalam masyarakat sesungguhnya lebih pada kemampuan afektifnya untuk mencapai kesadaran konatif yang

diharapkan (Sulistiyani, 2004: 83). Intervensi tersebut berusaha agar masyarakat membuka kesadaran akan kondisinya saat itu sehingga selanjutnya masyarakat sadar dan ingin merubah kondisinya saat itu agar dapat tercipta masa depan yang lebih baik.

Selanjutnya, **Transformasi Kemampuan**. Kondisi ini merupakan kondisi dimana masyarakat dapat membuka wawasan serta pengetahuan sehingga dapat meningkatkan keterampilan yang berkaitan dengan proses pembangunan. Transformasi wawasan dan pengetahuan ini menjadi kualitas yang satu tingkat lebih tinggi dari penyadaran dan pembentukan perilaku. Masyarakat akan diberikan pelajaran mengenai pengetahuan dan kecakapan-kecakapan yang tentunya relevan dengan perkembangan zaman dan apa yang menjadi kebutuhannya.

Kualitas tertinggi yaitu **Peningkatan Kemampuan Intelektual**. Pada kondisi peningkatan kemampuan intelektual, proses-proses pemberdayaan memuat pengayaan dan peningkatan keterampilan serta kecakapan-kecakapan yang sudah diajarkan pada tahap kedua. Sehingga kemudian akan membentuk kemandirian masyarakat. Kemandirian tersebut akan ditandai oleh kemampuan masyarakat didalam membentuk inisiatif, melahirkan kreasi-kreasi dan melakukan inovasi-inovasi di dalam lingkungannya (Sulistiyani, 2004:84). Masyarakat akan secara mandiri dalam melakukan pembangunan. Kondisi masyarakat yang sudah mandiri menjadikan

mereka sebagai pemeran utama dalam proses pembangunan sehingga pemerintah maupun pihak ketiga kedudukannya hanya sebagai fasilitator saja.

Pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah usaha yang dilakukan secara kolektif, tidak berdasarkan relasi satu lawan satu antara pekerja sosial dengan kliennya yaitu masyarakat. Namun, dalam penerapan strategi pemberdayaan terdapat relasi individu dimana pekerja sosial menjadi aktor tunggal meskipun nantinya memang menuju ke arah kolektivitas semua pihak. Strategi pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan melalui tiga aras atau matra pemberdayaan sebagai sebuah dimensi dalam pemberdayaan jika dikaitkan dalam konteks pekerjaan sosial yang kemudian aras atau matra tersebut meliputi Aras Mikro (*task centered approach*), Aras Mezzo dan Aras Makro (*large-system strategy*).

Konteks dalam penelitian ini dimana pemberdayaan sebagai upaya menciptakan kemandirian dan keswadayaan masyarakat akan menggunakan **Aras Mezzo** sebagai dimensi pemberdayaan yang dilakukan oleh LSM sebagai pekerja sosial. Aras ini menggunakan kelompok sebagai media intervensi, pendidikan dan pelatihan, dinamika kelompok, yang digunakan sebagai upaya dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keterampilan dan sikap-sikap masyarakat yang diberdayakan.

### 1.8.7. Pemberdayaan dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan

Saat ini kehidupan masyarakat global yang cenderung kapitalistik ditopang oleh perekonomian yang mengandalkan pada produksi modal dan produksi teknologi. Sementara itu, perekonomian yang bertumpu pada modal dan teknologi juga memerlukan sumberdaya yang tidak sedikit untuk menopangnya. Berangkat dari situasi tersebut, sumberdaya yang dibutuhkan merupakan sumberdaya alam yang notabene sifatnya terbatas namun kebutuhan akan sumberdaya terus meningkat. Pembangunan ekonomi tidak hanya meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat namun juga akan meningkatkan kerusakan lingkungan. Pembangunan berkelanjutan menjadi agenda besar yang harus dijalankan oleh semua pihak.

Berbagai definisi mengenai pembangunan berkelanjutan dapat ditemukan dalam literatur-literatur yang beredar. Namun, semua definisi tersebut menekankan kepada pembangunan ekonomi jangka panjang. *Brundtland Commission* mendefinisikan Pembangunan Berkelanjutan sebagai “*Development that meets the needs of present generations without compromising the ability of future generations to meet their own needs*” (United Nation, 2007). Definisi lain mengenai pembangunan berkelanjutan menyatakan bahwa yang disebut sebagai pembangunan berkelanjutan apabila pembangunan ekonomi suatu daerah dikategorikan pembangunan yang berkelanjutan dimana ketersediaan sumber daya

(manusia, alam, barang modal dan barang habis pakai) tidak mengalami penurunan dari waktu ke waktu (An-Naf, 2005).

Namun, secara umum pembangunan berkelanjutan didefinisikan sebagai model pemanfaatan sumber daya yang bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan manusia dengan prinsip kelestarian lingkungan sehingga tidak hanya memenuhi kebutuhan di masa sekarang melainkan juga bagi masa yang akan datang (Lee, 2012: 95).

Pembangunan berkelanjutan menjadi sebuah solusi yang tepat berkaitan dengan kondisi pembangunan saat ini yang cenderung tidak memperhatikan keberlanjutan ekologi, ekonomi dan sosial. Supardi (2003) menyatakan bahwa terdapat tiga alasan utama mengenai pentingnya pembangunan berkelanjutan.

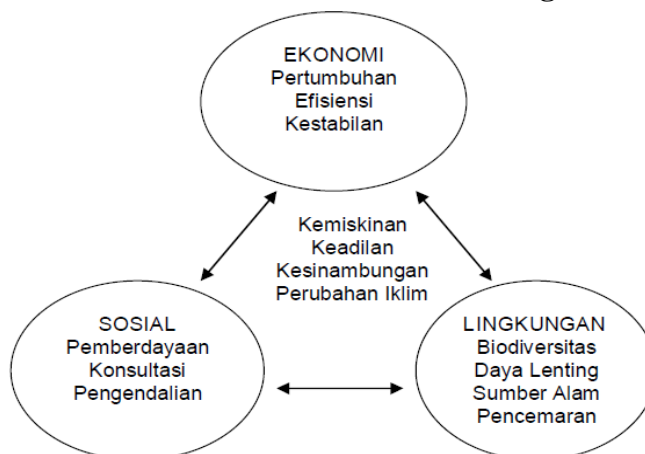
Alasan pertama yaitu **alasan moral**, masyarakat yang sedang menikmati hasil dari sumberdaya yang ada saat ini mempunyai tanggung jawab moral untuk menyisakan sumberdaya yang ada untuk generasi yang akan datang. Alasan kedua yaitu **alasan ekologi**, sumberdaya alam memiliki keanekaragaman hayati yang harus dilestarikan. Untuk itu, pembangunan tidak boleh sampai merusak keanekaragaman yang ada di alam. Terakhir yaitu **alasan ekonomi**, pembangunan harus bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak hanya kesejahteraan yang sifatnya sementara akan tetapi juga harus memperhitungkan kesejahteraan masyarakat antar generasi. Ketiga alasan pentingnya

pembangunan berkelanjutan merupakan konsep yang harus ada dalam setiap penerapan pembangunan berkelanjutan.

### 1.6.2.2. Relevansi Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan merupakan serangkaian sistem yang prinsipnya melibatkan masyarakat secara penuh dalam proses pemenuhan kebutuhan sekarang dan yang akan datang. Tentu saja kualitas sumber daya manusia suatu daerah sangat menentukan keberhasilan dari penerapan pembangunan berkelanjutan. Apabila kualitas sumber daya manusia suatu daerah dikategorikan baik maka partisipasi masyarakat akan tinggi dalam peran sertanya mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan begitupun berlaku sebaliknya jika sumber daya manusianya buruk. Pembangunan berkelanjutan memiliki elemen-elemen kunci dalam pelaksanaannya yang saling terkait, adapun skema elemen kunci pembangunan berkelanjutan seperti di bawah ini (Keman, 2007):

**Gambar 1. 1 Gambar Skema Elemen Kunci Pembangunan Berkelanjutan**



*Sumber: Keman, 2007*

Berdasarkan skema yang ditunjukkan diatas, pemberdayaan menjadi salah satu langkah dalam membentuk skema pembangunan berkelanjutan khususnya keberlanjutan sosial. Tujuan dari pemberdayaan yang berusaha menciptakan kemandirian serta keswadayaan masyarakat dalam mengelola sumber daya yang tersedia menjadi faktor pendukung dari keberhasilan pembangunan berkelanjutan. Terciptanya kemandirian dan keswadayaan masyarakat terbukti dengan penguasaan terhadap kemampuan serta keterampilan yang diperoleh selama pemberdayaan dilakukan. Kemampuan dan keterampilan tersebut digunakan untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya di sekitarnya. Dengan kata lain, pemberdayaan menjadi sarana untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di suatu daerah. Kualitas sumber daya manusia yang baik akan memiliki dampak positif terhadap daya dukung sosial untuk menerapkan pembangunan berkelanjutan di suatu daerah.

#### **1.6.2.1. Ketercapaian Pembangunan Berkelanjutan dalam Pemberdayaan**

Pembangunan berkelanjutan menerapkan prinsip pembangunan yang mengatur tentang ketersediaan sumber daya pada masa yang akan datang. Indikator-indikator pembangunan berkelanjutan menjadi acuan ketercapaian dari penerapan pembangunan berkelanjutan. Keberlanjutan ekologis, keberlanjutan ekonomi dan keberlanjutan sosial menjadi pilar penopang dari pembangunan berkelanjutan guna keberhasilan pencapaiannya (Abdoellah, 2017: 198).

**Keberlanjutan Sosial Budaya** (*Social-Cultural Sustainability*), menyangkut pada aspek keadilan sosial dimana sasaran yang dituju yaitu stabilitas penduduk, pemenuhan kebutuhan dasar manusia, memelihara keanekaragaman budaya serta mendorong partisipasi masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan (An-Naf, 2005).

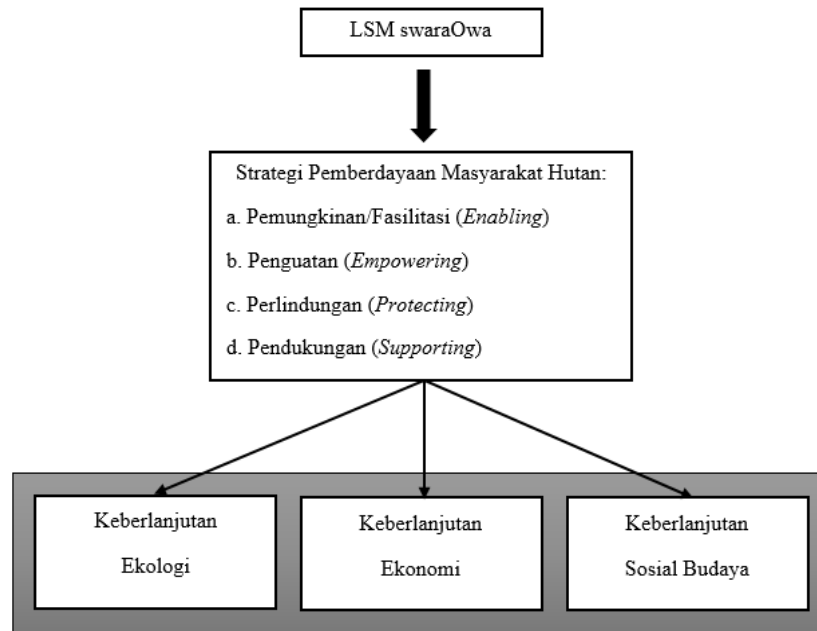
**Keberlanjutan Ekologis** (*Ecological Sustainability*), berkaitan dengan keberadaan sumber daya alam yang ada di bumi. Melalui upaya-upaya peningkatan daya dukung, daya asimilasi dan keberlanjutan pemanfaatan sumber daya yang dapat dipulihkan (*renewable resource*) akan menjaga kaidah-kaidah tatanan lingkungan yang mendukung keberlanjutan (An-Naf, 2005).

**Keberlanjutan Ekonomi** (*Economic Sustainability*), keberlanjutan ekonomi perlu ditopang oleh tiga unsur utama yaitu efisiensi ekonomi, kesejahteraan ekonomi berkesinambungan serta meningkatnya kemakmuran dan distribusi kemakmuran (An-Naf, 2005).



## 1.8. Operasionalisasi Konsep

Gambar 1. 2 Gambar Operasionalisasi Konsep



Keterangan:



: Pelaksanaan Strategi



: *Impact* Pelaksanaan Strategi



: Ruang Lingkup Pembangunan Berkelanjutan

## 1.8. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional yang berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal sehingga dapat dijangkau oleh penalaran manusia,

empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indera manusia sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan, serta sistematis yang berarti proses yang digunakan dalam penelitian menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang secara fundamental menggantungkan data terhadap manusia dan lingkungannya melalui pengamatan (Moleong, 2007: 4). Penelitian kualitatif digunakan untuk memperoleh data yang bersifat spesifik dan mendalam guna memperoleh suatu penjelasan ilmiah dibalik suatu peristiwa. Data yang dikumpulkan dalam penelitian kualitatif merupakan data yang sifatnya kata-kata, gambar dan bukan angka-angka.

### **1.8.1. Desain Penelitian**

Penelitian ini menggunakan desain penelitian Studi Kasus (*Case Study*), studi kasus merupakan desain penelitian dalam penelitian kualitatif yang memungkinkan peneliti untuk mempertahankan nilai-nilai holistik dan makna dari peristiwa-peristiwa kehidupan nyata seperti siklus kehidupan seseorang, proses-proses organisasional dan manajerial, perubahan lingkungan sosial, hubungan-hubungan internasional dan kematangan industri-industri (Yin, 2002: 4). Studi kasus akan menjadi sebuah desain yang cocok untuk penelitian tentang strategi pemberdayaan masyarakat LSM karena akan mengkaji peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan proses organisasional dan manajerial serta perubahan lingkungan sosial di suatu daerah.

Studi kasus dianggap sebagai strategi yang lebih cocok dalam penelitian sosial dengan pokok pertanyaan dalam rumusan masalah yang berkaitan dengan “*how*” dan “*why*” (Yin, 2002: 1). Sejalan dengan pokok pertanyaan dalam penelitian ini yaitu ingin mengetahui bagaimana strategi pemberdayaan masyarakat sebuah LSM dalam perspektif pembangunan berkelanjutan dan bagaimana dampaknya terhadap masyarakat tentunya studi kasus menjadi desain yang akan memperdalam analisis dari peristiwa yang terjadi. Sehingga dengan menggunakan desain penelitian studi kasus, data yang diperoleh merupakan data yang mendalam dan kaya akan informasi-informasi mengenai suatu kasus pemberdayaan masyarakat.

### **1.8.2. Lokus Penelitian**

Lokus penelitian merupakan pembatasan terhadap penelitian yang dilakukan untuk mencapai hasil yang benar-benar terfokus pada apa yang menjadi sasaran dan tujuan peneliti. Lokus pada penelitian ini yaitu kawasan Hutan Sokokembang Kabupaten Pekalongan, dimana penelitian akan memfokuskan kepada analisis strategi pemberdayaan masyarakat LSM swaraOwa kepada masyarakat Hutan Sokokembang dengan perspektif Pembangunan Berkelanjutan dalam menggunakan kacamata analisisnya. LSM swaraOwa dan masyarakat Hutan Sokokembang akan menjadi bagian penting dalam penelitian. Akan tetapi, tidak semua masyarakat kawasan hutan akan menjadi bagian dalam penelitian ini, melainkan hanya masyarakat yang benar-benar terlibat dalam strategi

pemberdayaan masyarakat LSM swaraOwa yang akan menjadi informan dalam penelitian. Digunakannya teknik *purposive* dalam penelitian dimana penentuan informan berdasarkan pertimbangan tertentu maka akan didapat informan yang dianggap paling tahu tentang apa yang akan diteliti (Sugiyono, 2010).

### **1.8.3. Jenis Data**

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data yang berupa kata-kata dan tindakan dari orang yang diamati atau diwawancarai, sumber tertulis seperti jurnal dan dokumen pribadi serta sumber-sumber yang didapatkan dari hasil observasi lapangan.

### **1.8.4. Sumber Data**

#### **1. Data Primer**

Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian melalui pengumpulan data secara langsung dengan wawancara. Adapun data primer didapat dari wawancara kepada informan penelitian yang meliputi:

- Arif Setiawan selaku Ketua LSM swaraOwa.
- Widi Haryo Nugroho selaku Kasubid Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup Bappeda Litbang Kabupaten Pekalongan.
- Eko Yuniyanto selaku KSP Lingkungan Perum Perhutani KPH Pekalongan Timur.

- Eva selaku Staff Bidang Pengendalian dan Pencemaran Lingkungan Dinas Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pekalongan.
- Purwo Susilo selaku Staff Bidang Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pekalongan.
- Tasuri selaku Penggerak Masyarakat Hutan dan Koordinator Kelompok Tani Wiji Mertiwi Mulyo.
- Rojjin selaku Ketua Karang Taruna Desa Kayupuring dan Sekretaris Pokdarwis Putra Wiguna.
- Yuli Andi Setiabudi selaku Ketua Pokdarwis Kendalisodo.
- Muhammad Kuswoto selaku Ketua Pokdarwis Weloasri.
- Kaslam selaku Kepala Desa Tlogohendro dan Petani Kopi.
- Tasbin selaku Ketua Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Tlogohendro.

## 1. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber yang tidak langsung dalam penelitian. Data sekunder merupakan data pelengkap untuk melengkapi data primer yang telah diperoleh. Data sekunder dapat berupa dokumen-dokumen, laporan-laporan, buku, jurnal, skripsi/tesis, foto, dan data observasi lapangan selama penelitian.

### 1.8.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk

mendapatkan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi:

### **1. Wawancara**

Wawancara yaitu metode pengumpulan data dengan melakukan percakapan yang terdiri dari dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan serta terwawancara yang memberikan jawaban atas suatu pertanyaan (Moloeng, 2007: 186). Penelitian ini menggunakan dua jenis wawancara yaitu wawancara mendalam (*indepth interview*) dan wawancara terstruktur (*structured interview*). Wawancara mendalam dilakukan dengan maksud agar peneliti mendapatkan data dan informasi mengenai pemberdayaan masyarakat hutan LSM swaraOwa, sedangkan wawancara terstruktur yaitu wawancara yang telah ditentukan daftar pertanyaan yang akan diajukan serta alternatifnya pun telah dipersiapkan. Wawancara terstruktur memerlukan beberapa alat bantu seperti *tape recorder* agar pelaksanaan wawancara menjadi lebih lancar.

### **2. Observasi**

Dalam rangka mendukung data dan informasi yang diperoleh saat wawancara, observasi perlu dilakukan untuk mendukung serta melengkapi data yang diperoleh dalam penelitian. Peneliti menggunakan observasi langsung untuk mengumpulkan data pendukung, observasi langsung dilakukan dengan kegiatan

formal dan informal. Observasi langsung dalam kegiatan formal meliputi pertemuan-pertemuan serta kegiatan lapangan (Yin, 2002: 113). Sedangkan dalam kegiatan informal, observasi langsung dilakukan pada kesempatan saat pengumpulan data lain yaitu pada saat wawancara.

### **3. Dokumentasi**

Hasil penelitian akan lebih kredibel jika didukung oleh dokumen-dokumen penting yang berkaitan dengan penelitian. Dokumen merupakan catatan kejadian yang telah berlalu. Dokumen yang diperoleh berupa dokumen tertulis seperti dokumen milik Perhutani Kabupaten Pekalongan, dokumen milik Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Pekalongan terkait pemberdayaan masyarakat hutan di Kabupaten Pekalongan serta dokumen milik LSM swaraOwa yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang telah dijalankan dalam program pemberdayaan masyarakat hutan. Dokumen yang berupa foto kegiatan-kegiatan LSM swaraOwa dalam penerapan strategi pemberdayaan masyarakat hutan.

#### **1.8.6. Analisis dan Interpretasi Data**

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Analisis dan interpretasi data dalam penelitian kualitatif dengan desain studi kasus tidak bisa dilakukan secara

sembarangan, melainkan membutuhkan strategi dalam proses analisis dan interpretasinya.

Strategi yang dipakai oleh peneliti yaitu **Strategi Proposisi Teoritis**, strategi yang mendasarkan pada proposisi teori sebagai dasar orientasi analisis, dengan begitu analisis data akan benar-benar terfokus pada data tertentu dan mengabaikan data lain yang tidak termasuk ke dalam preposisi teori yang dipakai (Yin, 2002: 136). Analisis yang dihasilkan akan mencerminkan serangkaian pertanyaan yang diajukan, tinjauan pustaka serta pemahaman-pemahaman baru.

Setelah menentukan strategi yang akan dipakai dalam penelitian, selanjutnya terdapat langkah-langkah yang harus dipenuhi guna melaksanakan analisis dan interpretasi data. Adapun langkah-langkah yang ditempuh meliputi:

**Pertama**, mengolah dan mempersiapkan data mentah untuk dianalisis. Proses ini melibatkan transkrip wawancara, men-*scanning* materi, mengetik data lapangan ke dalam jenis-jenis yang berbeda.

**Kedua**, membaca keseluruhan data. Pada proses ini langkah pertama yang harus dilakukan yaitu membangun *general sense* atas informasi yang diperoleh kemudian merefleksikan makna informasi secara keseluruhan (Creswell, 2013: 276).

**Ketiga**, pengumpulan kategori. Pengumpulan kategori merupakan tahap dalam proses analisis dan interpretasi data yang di dalamnya akan dilakukan kategorisasi-kategorisasi terhadap data



deskriptif yang telah terkumpul. Kategorisasi ini didasarkan pada penggunaan strategi preposisi teori sehingga kategorisasinya berdasarkan teori yang digunakan dalam penelitian ini (Yin, 2002). Pada langkah ini memerlukan proses *coding* agar kategorisasi benar-benar sesuai dengan preposisi teori yang digunakan.

**Keempat**, menunjukkan kategorisasi-kategorisasi yang telah terkumpul dalam suatu bentuk laporan kualitatif dengan pendekatan deskriptif dalam penyampaian hasil analisisnya (Creswell, 2013: 283).

#### **1.8.7. Kualitas Data**

Kualitas data digunakan untuk mengukur keaslian, keakuratan dan keabsahan data yang telah diperoleh. Metode yang digunakan untuk mengukur hal tersebut yaitu metode triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Triangulasi digunakan untuk memeriksa data dengan membandingkan data yang diperoleh dengan data dari berbagai sumber.

Penelitian ini akan menggunakan jenis Triangulasi Sumber Data. Triangulasi sumber data dilakukan dengan mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Triangulasi sumber data berarti membandingkan informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif sehingga akan dapat diukur sejauh mana kualitas data yang diperoleh. Dalam hal ini, triangulasi sumber data mencoba mencari perbedaan antara informasi yang diperoleh dengan

sumber data yang lain sehingga dapat ditemukan sebuah kesimpulan tentang informasi yang telah diperoleh.

Triangulasi sumber data dilakukan dengan membandingkan data hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Membandingkan jawaban informan saat wawancara dengan data lapangan yang terkumpul dari observasi dan dokumentasi, sehingga peneliti mampu membandingkan data yang diperoleh dari proses pengumpulan data di lapangan guna kepentingan analisis dan interpretasi data.